

JUDUL ESAI

**“(MEREALISASIKAN KESETARAAN GENDER DALAM
MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI
INDONESIA)”**

Karya Ini Disusun Untuk Mengikuti Lomba Esai Nasional

“Pembangunan Berkelanjutan (SDG)”



Penulis :

(Arland Pratama Wijaya)

”Bukan sekali-sekali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”

(R.A. Kartini, 1902). Seperti yang dicanangkan PBB melalui programnya *Sustainable Development Goals* (SDG) yang resmi disepakati oleh negara-negara PBB termasuk Indonesia pada tahun 2015. Dimana salah satu tujuannya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Mengapa begitu penting kehadiran perempuan dalam pembangunan skala berkelanjutan ?. karena kita tahu begitu banyak perempuan yang sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya bangsa ini. Perempuan kini bukan lagi dipandang sebagai pendamping kaum laki-laki dalam keikutsertaannya bernegara. Tetapi masih terjadi diskriminasi yang terjadi pada kaum perempuan. Di bidang pendidikan, perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu, tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia juga masih didominasi oleh kaum perempuan (kompas, 29 Juli 2010). Tentu permasalahan ini harus segera ditangani apalagi di kehidupan modern seperti ini baik laki-laki dan perempuan harus mendapatkan hak yang sama. Dan dengan adanya program *Sustainable Development Goals* (SDG) perempuan mempunyai alat tagih kepada pemerintah untuk mendapatkan hak-hak nya, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.

MEREALISASIKAN KESETARAAN GENDER DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA

”Bukan sekali-sekali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.”
(R.A. Kartini, 1902).

Seperti yang dicanangkan PBB melalui programnya *Sustainable Development Goals* (SDG) yang resmi di sepakati oleh Negara-negara PBB termasuk Indonesia pada tahun 2015. salah satu tujuannya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan peran pemerintah itu sendiri dalam menanggulangi kesenjangan gender yang terjadi.

Jika di bandingkan dengan laki-laki , perempuan lebih kurang mendapatkan hak-hak secara penuh. Contoh, dalam kasus perdagangan manusia (*human trafficking*) kaum perempuan lah yang banyak menjadi korban. Lalu peristiwa yang akhir-akhir ini marak terjadi pernikahan di usia dini. Mengapa demikian, dalam penjabaran intinya menyebutkan bahwa perempuan indonesia berfungsi sebagai istri pengatur rumah tangga, sebagai tenaga kerja di segala bidang dan sebagai pendidik pada bagi anak-anaknya. Konsep tersebut semakin membingungkan perempuan di Indonesia untuk memilih antara terjun dalam kegiatan di luar rumah (pendidikan) atau menjadi istri serta ibu yang baik (Retno Suharti, 1995).

Seperti yang di katakan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat 1 mengamanatkan bahwa ”setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas perempuan harus mendapatkan hak sama seperti kamu laki-laki. Pemerintah pun sudah mulai membuka peluang untuk perempuan dalam keikutsertaannya dalam membangun bangsa. Tetapi nyatanya di bidang pendidikan, perempuan menjadi pilihan terakhir untuk mendapatkan akses. Oleh karena itu, tingkat buta huruf tertinggi di Indonesia juga masih didominasi oleh kaum perempuan (kompas, 29 Juli 2010).

Dalam momentum *Sustainable Development Goals* (SDG), Perempuan dapat memanfaatkan sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dan untuk mewujudkan itu semua butuh keikutsertaan seluruh elemen-elemen yang dapat membuat kebijakan.

Tentu dalam menentukan setiap langkah terdapat tantangan-tantangan yang menjadi penyebab kesenjangan gender yang terjadi, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan disegala bidang pembangunan, terutama dibidang pendidikan kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan
2. Memperbaiki peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kesenjangan / deskriminatif terhadap perempuan
3. Meningkatkan kesempatan kerja dan partisipasi perempuan dalam pembangunan politik dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender diseluruh tahapan pembangunan dan diseluruh tingkat pemerintahan (nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota)
4. Dibidang pendidikan tantangan yang dihadapi antara lain yaitu : meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, menyediakan pelayanan pendidikan secara lebih luas dan beragama, dan menyempurnakan seluruh materi bahan ajar agar *responsive* gender.

Dalam menjawab tantangan di atas haruslah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur, diantaranya :

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu dan berwawasan gender bagi semua anak laki-laki dan perempuan.

2. Menurunkan tingkat buta huruf penduduk, terutama penduduk perempuan melalui peningkatan kinerja pada setiap jenjang pendidikan baik melalui sekolah maupun luar sekolah (organisasi sosial).
3. Meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan pemerataan gender.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, kebijakan diarahkan pada penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun. Penurunan secara signifikan jumlah penduduk yang buta huruf. Peningkatan keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan.

Kondisi kesetaraan gender dalam pendidikan yang beragam memerlukan bentuk-bentuk intervensi yang beragam. Sehingga berbagai program yang dilaksanakan benar-benar dapat menurunkan kesenjangan dalam hal pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk meningkatkan pendidikan baca tulis, sangat jelas bahwa tingkat melek huruf penduduk perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di setiap kelompok usia penduduk dewasa, dan di setiap kelompok keluarga. Namun prioritas utama diberikan pada upaya peningkatan kemampuan baca tulis penduduk perempuan yang miskin dan tinggal di daerah perdesaan dan berusia lebih dari 25 tahun. Karena kelompok inilah yang memiliki tingkat melek huruf paling rendah yang diikuti oleh penduduk laki-laki kelompok usia yang sama, yang miskin dan tinggal di perdesaan.

Seluruh upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk tersebut di atas haruslah didukung dengan upaya peningkatan kemampuan kelembagaan pendidikan sehingga memiliki kemampuan dalam merencanakan pendidikan yang tanggap gender, disamping meningkatkan pemahaman semua pihak mengenai pentingnya pendidikan baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kelompok dan organisasi perempuan juga harus aktif dalam mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan

perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator. Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan keterkaitan sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka menengah desa terhadap target dan indikator dalam tujuan Pembangunan berkelanjutan. Kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat menggunakan target dan indikator Agenda Pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender.